

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Penduduk Indonesia khususnya angkatan kerja harus bekerja salah satunya dengan bekerja di suatu instansi baik berupa instansi negeri ataupun swasta agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan mendapatkan penghasilan karyawan seharusnya tidak hanya memikirkan masa sekarang saja melainkan juga harus memikirkan masa yang akan datang apakah setelah usianya sudah tidak produktif ataupun ada sebab-sebab lain yang mengakibatkan dirinya tidak bisa bekerja akan mendapatkan penghasilan atau tidak.

Banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sejak muda menghadapi masa pensiun yaitu dengan mempersiapkan sejumlah dana atau proteksi lainnya, agar dimasa pensiun tidak merepotkan orang lain karena tidak produktif lagi dalam bekerja. Selain itu dengan memilih instrumen investasi dengan risiko yang relatif tinggi seperti portofolio investasi berisi saham, obligasi, reksa dana serta produk asuransi. Jumlah Dana pensiun yang dapat dinikmati pada masa pensiun adalah sebesar Rp. 11 Milyar. Jika dibagi selama 25 tahun, maka keperluan dana pensiun pertahun yaitu sebesar Rp. 440 juta.¹

¹ www.kompasiana.com, diakses pada 21 Januari 2016 pukul 12.20

Data Otoritas Jasa Keuangan IKBN (Industri Keuangan Non Bank) tentang statistik dana pensiun per Desember 2016 menunjukkan total aset dana pensiun di Indonesia meningkat dari Rp. 206,59 triliun di tahun 2015 menjadi Rp. 238,30 triliun. Nilai aset dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang menjalankan program manfaat pasti (PPMP) meningkat dari Rp. 136,45 triliun menjadi Rp. 144,72 triliun. Sedangkan, total aset DPPK yang menjalankan program pensiun iuran pasti (PPIP) sebesar Rp. 22,12 triliun meningkat menjadi Rp. 25,55 triliun dan aset dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) meningkat dari Rp. 48,03 triliun menjadi Rp. 56,74 triliun.²

Dalam memenuhi kesejahteraan pegawai salah satu yang harus dilakukan oleh instansi yaitu dengan memberikan perencanaan hari tua yaitu pensiun (purnakarya) karena dengan diberikan perencanaan hari tua ini maka pegawai akan termotivasi dan *loyal* terhadap pekerjaannya serta dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap instansi. Untuk menunjang kesejahteraan pegawai berupa pensiun maka harus dibentuk suatu lembaga yaitu lembaga Dana Pensiun.

Tugas yang dijalankan oleh dana pensiun yaitu mengelola dan menginvestasikan dana yang telah disimpan dari kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan karyawan juga turut membayar kontribusi tersebut. Pengelolaan suatu dana pensiun memerlukan penanganan secara profesional agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan dan diinvestasikan sebaik-baiknya yaitu kepada sektor yang aman, maksudnya yaitu sektor tersebut tidak memiliki risiko

² www.ojk.go.id, diakses pada 19 Februari 2016 pukul 15.37

sama sekali, selain itu juga cepat menghasilkan keuntungan sesuai arahan investasi yang telah ditetapkan oleh para pendiri perusahaan.³

Pengelolaan mengenai program dana pensiun dapat dipandang dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi program dana pensiun bertujuan untuk mengatur mengenai akuntansi dan pelaporan oleh dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan, serta untuk menunjang para pengguna laporan yang terkait dengan laporan keuangan. Informasi laporan keuangan ini diinformasikan tidak hanya kepada manajemen pengelola dana pensiun perusahaan terkait melainkan juga kepada peserta dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan investasi dana pensiun, kegiatan operasional dana pensiun apakah telah dilakukan secara efisien dan wajar. Faktor kebijakan manajemen perusahaan mengatur program pensiun ditentukan oleh pelaporan dana pensiun. Kebijakan ini akan mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan mengenai kewajaran pada laporan keuangan. Sedangkan jika ditinjau dari segi sosial, pengelolaan dana pensiun dalam program pensiun yang bertujuan untuk mengatur kesejahteraan karyawannya. Kesejahteraan karyawan berpengaruh pada peningkatan semangat kerja karyawan dan produktivitas perusahaan.⁴

Pada tanggal 19 Februari 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 (revisi 2010) mengenai Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya merupakan adopsi dari IAS 26 *Accounting and Reporting by*

³ Wahyu Efendy, "Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Dana Pensiun pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia", Artikel Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2014.

⁴ Elvina Octavia Bukit, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada Dana Pensiun Pertamina" Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2012

Retirement Benefit Plans per 1 Januari 2009 yang biasanya dipraktikkan oleh suatu perusahaan yang mengadakan program manfaat pensiun. Sebelum adanya revisi, PSAK 18 (1994) mengatur mengenai Akuntansi Dana Pensiun. PSAK 18 yang berlaku saat ini yaitu Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya yang mengatur seluruh penyelenggaraan program manfaat purnakarya dimana termasuk didalamnya adalah entitas Dana Pensiun.

Oleh karena itu dengan berkembangnya dana pensiun dan sesuai dengan pandangan mengenai program dana pensiun dari segi ekonomi yaitu mengatur tentang akuntansi dan pelaporan dana pensiun maka perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar terdapat keseragaman dalam penyajian laporan keuangan, laporan keuangan tersebut harus bisa menginformasikan bahwa dana yang ada memang benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut dan memudahkan pemakai untuk memahami informasi yang disajikan yaitu dengan peraturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya, diharapkan agar laporan keuangan dana pensiun dapat menyajikan laporan yang signifikan secara lebih andal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Karya Ilmiah berjudul **“Analisis Penerapan PSAK 18 mengenai Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada Dana Pensiun PT. BNI Jakarta Tahun 2014-2015”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya pada Dana Pensiun PT. BNI?
2. Bagaimana perbandingan Laporan Keuangan Dana Pensiun PT. BNI dengan PSAK No.18?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya pada Dana Pensiun PT. BNI;
- b. Untuk membandingkan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya pada Dana Pensiun PT. BNI dengan PSAK No.18.

2. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini yaitu:

Bagi Penulis:

Dapat memberikan ilmu kepada penulis mengenai penerapan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya;

Bagi Perusahaan:

Menjadi bahan pertimbangan sebagai kontribusi bagi manajemen dana pensiun dalam pencatatan akuntansi dana pensiun.

Bagi Pihak Lain:

Dapat dijadikan sebagai referensi mengenai penelitian yang sama, mengenai topik dan permasalahan.